

Peran Bank Indonesia dalam Membangun Ekosistem Pembayaran Digital yang Aman dan Inklusif

Meutiara Claudia Az-zahra¹, Nur' Aini²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

meutiaraclaudiaazzahra2@gmail.com¹, aininingrum77@gmail.com²

ABSTRACT

Keywords:

Bank Indonesia, Digital Payment, Financial Inclusion, Payment System, Fintech Regulation.

Abstract: This study explores the strategic role of Bank Indonesia in developing a secure and inclusive digital payment ecosystem in Indonesia. Using a qualitative approach with a literature review method, the research analyzes Bank Indonesia's regulatory policies, infrastructure development initiatives, and its synergy with fintech and banking industries to ensure accessibility, efficiency, and security in digital transactions. The findings reveal that Bank Indonesia plays a key role as regulator, catalyst, and facilitator, particularly in promoting QRIS standardization, increasing financial literacy, and safeguarding consumer protection. Despite these efforts, challenges such as the digital divide, cybersecurity threats, and uneven adoption across regions remain critical. This paper offers strategic insights for strengthening digital financial governance and ensuring broader access to digital economy benefits across Indonesian society.

Kata Kunci:

Bank Indonesia, Digital Payment, Financial Inclusion, Payment System, Fintech Regulation.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran strategis Bank Indonesia dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang aman dan inklusif di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menganalisis kebijakan regulasi, pembangunan infrastruktur, serta sinergi Bank Indonesia dengan industri fintech dan perbankan dalam mendorong aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator, terutama melalui standarisasi QRIS, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Namun, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan adopsi yang tidak merata antarwilayah. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan digital dan memastikan akses merata terhadap manfaat ekonomi digital bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi modern di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya inovasi dalam sistem pembayaran yang mengubah cara masyarakat melakukan transaksi (Gita Sari Dewi et al., 2023). Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi menjadi keunggulan utama dari sistem pembayaran digital yang kini semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat Fidhayanti (2020) Di tengah tren tersebut, hadirnya Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa perubahan ini tetap berada dalam kerangka yang aman, adil, dan inklusif (Revak & Gren, 2022).

Peran strategis Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak hanya terbatas pada menjaga kestabilan moneter, tetapi juga mencakup pengawasan dan pengembangan sistem pembayaran nasional. Dengan dikeluarkannya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), Bank Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang

dilakukan adalah melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar pembayaran berbasis kode QR secara nasional (Riyadi et al., 2023).

Namun, digitalisasi sistem pembayaran juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, kehadiran layanan keuangan digital mempermudah transaksi dan mendukung inklusi keuangan; di sisi lain, terdapat risiko yang harus diantisipasi seperti keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta kesenjangan literasi digital antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang adaptif dan berbasis prinsip kehati-hatian agar ekosistem pembayaran digital tetap mampu memberikan manfaat secara luas dan berkelanjutan (Riyadi et al., 2023).

Pentingnya inklusi keuangan digital menjadi sorotan utama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan sosial ekonomi. Masih banyak masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dalam hal ini, digitalisasi menjadi peluang strategis untuk menjangkau mereka yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan formal. Namun demikian, keberhasilan ini hanya dapat dicapai apabila infrastruktur dan regulasi mendukung aksesibilitas yang merata.

Bank Indonesia menyadari bahwa untuk membangun sistem pembayaran digital yang aman dan inklusif, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, industri fintech, perbankan, serta masyarakat. Selain itu, pendekatan edukatif menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan digital, tetapi juga memahami risiko dan tata cara penggunaannya secara bijak. Upaya peningkatan literasi digital dan keuangan pun dilakukan melalui program nasional serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan komunitas (Gertruida et al., 2021).

Bank Indonesia juga berperan sebagai fasilitator dalam mendorong kolaborasi lintas sektor melalui penyediaan infrastruktur seperti BI-FAST dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta memperkuat interoperabilitas antarpenyedia layanan. Dengan demikian, konsumen memiliki fleksibilitas dalam memilih layanan pembayaran tanpa harus terikat pada satu ekosistem tertentu (Husein & Zikry, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekosistem pembayaran digital bukan semata soal teknologi, melainkan soal bagaimana menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan aman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Bank Indonesia dalam membangun dan mengatur ekosistem pembayaran digital nasional, serta bagaimana kebijakan dan programnya menjawab tantangan inklusi dan perlindungan dalam era ekonomi digital yang terus berkembang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai landasan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait sistem pembayaran digital di Indonesia. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi resmi yang diterbitkan oleh otoritas moneter seperti Bank Indonesia, serta laporan terkini dari lembaga keuangan dan organisasi terkait lainnya. Dengan mengandalkan sumber-sumber kredibel ini, penelitian dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran digital.

Dalam proses seleksi data, diterapkan kriteria inklusi yang ketat, yakni hanya mencakup dokumen yang relevan, terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dan membahas isu-isu penting seperti kebijakan sistem pembayaran, literasi keuangan, serta regulasi financial technology (fintech). Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan konten (content analysis) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema utama yang

muncul dari literatur. Beberapa tema sentral yang menjadi fokus analisis meliputi aspek regulasi sistem pembayaran digital, inovasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan keuangan, serta upaya peningkatan inklusi keuangan melalui digitalisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran regulasi dan inovasi dalam mendorong transformasi sistem pembayaran nasional menuju arah yang lebih inklusif dan efisien.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bank Indonesia sebagai Regulator Sistem Pembayaran

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan melalui kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu kebijakan utama yang dikeluarkan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan sistem pembayaran digital di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 sebagai dokumen strategis jangka menengah yang mengarahkan pengembangan sistem pembayaran nasional menuju ekosistem yang lebih inklusif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam regulasi tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya tiga prinsip utama, yaitu interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam setiap transaksi digital. Interoperabilitas mendorong integrasi antar penyedia jasa pembayaran, sehingga konsumen dapat bertransaksi secara lintas platform tanpa hambatan. Aspek keamanan menjadi perhatian khusus guna mengantisipasi risiko siber yang meningkat seiring tingginya volume transaksi digital. Sementara itu, efisiensi ditujukan untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh.

Salah satu inisiatif strategis yang diwujudkan oleh Bank Indonesia dalam kerangka BSPI 2025 adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan sistem pembayaran digital dengan mengintegrasikan berbagai platform ke dalam satu standar kode QR yang dapat digunakan secara nasional. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi konsumen, tetapi juga memperluas jangkauan digitalisasi ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, QRIS menjadi langkah konkret dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

2. Penguatan Infrastruktur dan Inklusi Keuangan

Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga secara aktif membangun infrastruktur digital sebagai fondasi utama untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Infrastruktur strategis seperti BI-FAST, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan interoperabilitas QRIS dirancang untuk memperkuat konektivitas antarpemilik layanan keuangan serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi. Kehadiran infrastruktur ini memungkinkan integrasi sistem pembayaran yang lebih luas, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga mempersempit kesenjangan akses terhadap layanan keuangan digital di seluruh Indonesia.

Pembangunan infrastruktur pembayaran digital oleh Bank Indonesia juga memiliki dampak signifikan terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Melalui kemudahan akses terhadap sistem pembayaran digital yang aman dan terstandarisasi, UMKM dapat bertransaksi secara lebih efisien, meningkatkan daya saing, serta menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk melalui platform daring. Dengan demikian, transformasi digital dalam sistem pembayaran turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain pembangunan infrastruktur, Bank Indonesia juga secara konsisten mendorong peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Upaya ini dilakukan melalui sinergi bersama kementerian terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Salah satu kampanye edukatif yang menonjol adalah "Cinta, Bangga, Paham Rupiah Digital," yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan uang digital secara bijak dan aman. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai dalam memanfaatkannya secara optimal.

3. Tantangan dan Risiko

Meskipun berbagai capaian signifikan telah diraih dalam proses digitalisasi sistem pembayaran nasional, sejumlah tantangan krusial masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap infrastruktur internet, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Akses internet yang belum merata menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut kesulitan memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital dan ekonomi apabila tidak ditangani secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain keterbatasan akses, rendahnya literasi digital, khususnya pada kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, juga menjadi hambatan dalam mendorong inklusi keuangan digital. Banyak dari kelompok ini yang masih merasa asing dengan teknologi dan belum memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem pembayaran digital. Ketidapahaman terhadap fitur, risiko, serta keamanan transaksi digital dapat menimbulkan resistensi atau bahkan kerugian, sehingga edukasi literasi digital perlu terus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya setempat.

Ancaman kejahatan siber turut menjadi isu yang tidak kalah penting dalam era digitalisasi keuangan. Peningkatan frekuensi serangan siber, penipuan digital, dan kebocoran data pribadi menuntut penguatan sistem keamanan digital yang canggih dan responsif. Dalam hal ini, Bank Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk terus memperbarui kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Lebih dari itu, kolaborasi lintas sektor mencakup institusi keuangan, penyedia teknologi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, adil, dan inklusif, tanpa menciptakan ketimpangan baru dalam masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga aman dan inklusif. Melalui peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator, Bank Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan strategis seperti implementasi QRIS, BI-FAST, dan penguatan sistem keamanan transaksi digital. Selain itu, penguatan regulasi terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran serta penyediaan infrastruktur yang mendukung interoperabilitas menjadi upaya nyata dalam mendukung transformasi digital nasional di sektor keuangan.

Namun, keberhasilan ekosistem ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, serta meningkatnya ancaman kejahatan siber memerlukan pendekatan kolaboratif dan edukatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Bank Indonesia perlu terus diperkuat dalam hal perlindungan konsumen, edukasi masyarakat, dan peningkatan sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaat dari sistem pembayaran digital secara adil dan merata.

REFERENSI

- Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 16–47. <https://doi.org/10.18860/J.V11i1.5829>
- Gertruida, M., Nkgolodishe, N., Phaladi, H., Van Niekerk, M. G., & Phaladi, N. H. (2021). *Digital Financial Services: Prospects And Challenges*. <https://doi.org/10.17159/1727>
- Gita Sari Dewi, Zainal Abidin Sahabuddin, & Susilo Adi Purwanto^{Ro}. (2023). DIGITAL Transformation of Micro, Small and Medium Enterprises (Msmes) In Realizing Indonesia's Economic Independence in the Era of Industry 4.0. *International Journal of Social Science*, 2(5), 2093–2106. <https://doi.org/10.53625/ijss.V2i5.4817>
- Husein, Y., & Zikry, I. (2022). Legal And Institutional Aspects of the Financial Sector in Handling The COVID-19 Pandemic. *Journal Of Central Banking Law and Institutions*, 1(2). <https://doi.org/10.21098/Jcli.V1i2.15>
- Revak, I. O., & Gren, R. T. (2022). Digital Transformation: Background, Trends, Risks, And Threats. *Social And Legal Studios*, 5(2), 61–67. <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-2-61-67>
- Riyadi, S., Hariyadi Raharjo, D., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2023). Bank Indonesia Bersama Perbankan Syariah Membantu Digitalisasi UMKM Dengan Manfaatkan Teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS Bank Indonesia and Islamic Banking Assist in The Digitization of UMKM By Utilizing Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Technology. *KRESNA: Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59–66. <https://jurnaldrpm.budiluhur.ac.id/index.php/kresna/>